

Perempuan dan Kebangsaan

Catatan Jurnal Perempuan Perempuan dan Kebangsaan

Artikel

Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia
Siti Utami Dewi Ningrum

Perempuan dalam Film Indonesia Tentang "Indonesia Timur"
Meike Lusye Karolus

Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan
Mutiah Amini

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017
Lelly Andriasanti

Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme
Fitria Sari

Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan
Ruth Indah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia

Diterbitkan oleh:

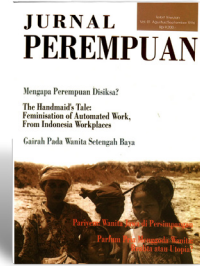
YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

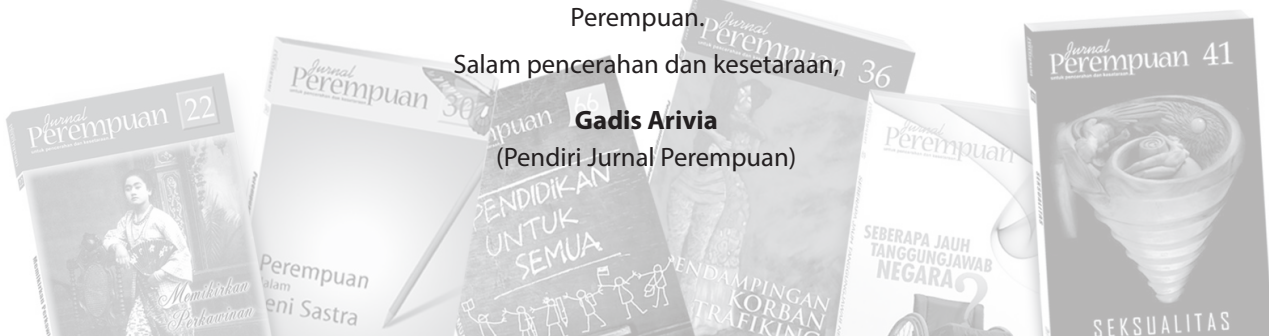
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigi

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigi, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebangsaan/Women and Nationalismiii

Artikel / Articles

- Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia / *The Revival of the "Mothers of the Nation" from the Period of Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia* 129-141
Siti Utami Dewi Ningrum
- Perempuan dalam Film Indonesia Tentang "Indonesia Timur" / *Women in Indonesian Films about "Eastern Indonesia"* 143-152
Meike Lusye Karolus
- Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan / *Gender Bias in Historiography of Indonesia and the Writing of Women's History* 153-160
Mutiah Amini
- Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 / *Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017* 161-171
Lelly Andriasanti
- Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme / *Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists* 173-182
Fitria Sari
- Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan / *Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations About Women and Nationalism* 183-192
Ruth Indah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia

Perempuan dan Kebangsaan *Women and Nationalism*

P roklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun atas dasar konsepsi anticolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima. Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007) mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang "Kewajiban dan Cita-Cita Putri Indonesia" telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama. Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara, dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga. Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth I Rahayu 2017).

Situasi ini mendorong *Jurnal Perempuan* membuka ruang percakapan untuk mendiskusikan politik perempuan dalam menanggapi problem kebangsaan dan agensi perempuan dalam mentransformasi kebangsaan-Indonesia hingga dewasa ini. Ruang percakapan ini sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, karena konsep dan nilai kebangsaan kerap mengatasnamakan kepentingan perempuan. Meskipun yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya, dua puluh tahun reformasi justru diisi dengan munculnya peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas dan agama yang ironisnya dalam proses penyusunannya juga didukung dan/atau diusung oleh partai politik nasionalis/sekuler. Pelabelan negatif terhadap kelompok yang dianggap

berbeda masih sering terjadi, baik terhadap hal keyakinan atau aliran kepercayaan; orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender; maupun pilihan dan afiliasi politik. Tak jarang pelabelan negatif ini kemudian mengarah pada tindakan persekusi. Kondisi ini tentu tidak hanya mengancam kehidupan perempuan dan kelompok marginal, tetapi juga konsensus kebangsaan dan kehidupan demokrasi.

Para sarjana feminis mengkritik diabaikannya perempuan dan gender dalam kajian tentang kebangsaan. Mereka mengkaji nasionalisme/kebangsaan dengan dua pendekatan utama: pertama melalui pemeriksaan terhadap peran perempuan dalam gerakan kebangsaan, kedua lewat pengembangan teori dalam menganalisis cara-cara 'bangsa' didasarkan pada identitas dan makna gender tertentu (Ranchod-Nilsson & Tetreault 2000). Lebih jauh para feminis juga berfokus pada cara-cara perempuan bukan hanya menjadi simbol wacana kebangsaan dalam hal konstruksi bangsa dan gender, tetapi juga mampu merestrukturisasi proyek-proyek kebangsaan untuk memasukkan tujuan feminis (Vickers 2006 dikutip dalam Kaufman & Williams 2011).

Riset *Jurnal Perempuan* yang mengupas percakapan perempuan atau feminis tentang kebangsaan mengungkap bahwa perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan memiliki kepentingan yang "independen" terhadap kebangsaan. Namun demikian kepentingan perempuan tersebut dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Di sisi lain upaya mobilisasi dan politisasi perempuan juga digunakan untuk menolak ide kebangsaan dan menyebarkan gagasan radikal-fundamentalis seperti temuan kajian tentang pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Selain itu, artikel-artikel dalam edisi ini juga menunjukkan bahwa penulisan sejarah dan narasi perempuan terkait tema kebangsaan baik dalam bentuk kajian akademis maupun budaya populer (film) juga masih diwarnai adanya bias gender, kelas, ras, etnis, agama, dll. Untuk itu dibutuhkan pendekatan interseksional agar dapat menangkap dan memahami gagasan, jejak dan aktivitas perempuan dalam memaknai dan menghidupi konsep kebangsaan. Sementara itu sepanjang sejarah perjalanan kebangsaan dari awal munculnya gagasan kebangsaan hingga hari ini perempuan telah dan masih bergelut dan bekerja dalam aktivitas sehari-hari di ranah kewargaan untuk membangun masyarakat warga dan mereproduksi kebangsaan. (Anita Dhewy)

Siti Utami Dewi Ningrum (Program Studi S2 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia)

**Kebangkitan Para “Ibu Bangsa” Sejak Masa Pergerakan
Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia**

***The Revival of the “Mothers of the Nation” from the Period of
Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 129-141, 8 gambar,
38 daftar pustaka

“Mothers of the Nation” or *ibuism* is a term that is often considered negative in the study of women’s history. This is related to the nation’s political journey, during which the New Order regime took power, the terminology was used to control and dominate women in Indonesia. Further explored, in the 1920s, the spirit of nationalism are grew, including among the (*priayi*) noble women. They formed an association and held the Indonesian Women’s Congress I in 1928. According to Susan Blackburn, what women did at the time was their nationalistic form, becoming “Mothers of the Nation.” Using a historical approach, this paper seeks to retrace how early noble women came into existence and formulated their ideas of nationalism. The sources used are the result of literature studies, whether magazines, books, scientific papers, memoirs or biographies of women movement. This paper also use oral and photo sources to complete the experiences of women who involved in this topic.

Keywords: mothers of the nation, women’s history, nationalism, noble women

“Ibu Bangsa” atau *ibuisme* merupakan terminologi yang sering kali dianggap bermakna negatif dalam kajian tentang sejarah perempuan. Hal ini berkaitan dengan perjalanan politik bangsa, di mana saat rezim Orde Baru berkuasa, terminologi tersebut digunakan untuk mengontrol dan mendomestikasi perempuan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, pada tahun 1920-an, semangat kebangsaan semakin membara, termasuk di kalangan perempuan *priayi*. Mereka membentuk perkumpulan hingga mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Menurut Susan Blackburn, yang dilakukan oleh para perempuan saat itu adalah bentuk nasionalisme mereka, menjadi “Ibu Bangsa”. Menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha merunut kembali bagaimana perempuan *priayi* mula-mula hadir dan merumuskan idenya tentang semangat berkebangsaan. Sumber-sumber yang digunakan merupakan hasil dari studi pustaka, baik majalah, buku, karya ilmiah, memoar maupun biografi para perempuan pergerakan. Digunakan pula sumber lisan dan foto untuk dapat melengkapi pengalaman perempuan yang terlibat dalam tema tulisan ini.

Kata kunci: ibu bangsa, sejarah perempuan, nasionalisme, perempuan *priayi*

Meike Lusye Karolus (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Perempuan dalam Film Indonesia Tentang
“Indonesia Timur”**

Women in Indonesian Films about “Eastern Indonesia”

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 143-152, 4 gambar,
36 daftar pustaka

The purpose of this study is to explain about women’s positions and roles that are represented in films as agents who frame identity and ethnical stereotype of “the East”. By using intersectional feminist perspective, the study analyse texts from three Indonesian films which using film sets in the regions of Eastern Indonesia as follows: *Aisyah: Let Us Be a Family* (2016), *Salawaku* (2016), and *Marlina, the Murderer in Four Acts* (2017). Findings show that films about Eastern Indonesia still embed with the perspectives of orientalism and colonialism. Women from non-Eastern Indonesia are commonly represented to having superior positions and important roles in educating and spreading the feeling of nationalism. On the other hand, Eastern Indonesian women are mostly represented inferior and alienated from their communities and nature.

Keywords: film, representation, orientalism, colonialism, intersectionality

Tulisan ini bertujuan menjelaskan posisi dan peran perempuan yang direpresentasikan dalam film sebagai agen yang membingkai identitas dan stereotip etnis “Timur”. Dengan menggunakan perspektif feminis interseksional, penelitian ini menganalisis teks-teks dari tiga film Indonesia yang berlokasi di wilayah Indonesia Timur, yaitu *Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara* (2016), *Salawaku* (2016), dan *Marlina, Si Pembunuh dalam 4 Babak* (2017). Hasilnya, film-film tentang Indonesia Timur masih melekat dengan perspektif orientalisme dan kolonialisme. Perempuan dari non Indonesia Timur direpresentasikan memiliki posisi yang lebih superior dan berperan penting dalam mengedukasi dan menyebarkan rasa nasionalisme. Di sisi lain, perempuan Indonesia Timur direpresentasikan inferior dan terasing dari komunitas dan alamnya.

Kata kunci: film, representasi, orientalisme, kolonialisme, interseksionalitas

Mutiah Amini (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan
Penulisan Sejarah Perempuan**

***Gender Bias in Historiography of Indonesia and
the Writing of Women’s History***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 153-160, 30 daftar
pustaka

This paper discusses gender bias within the Indonesian historiography tradition. Various historical literature records that all major events in Indonesian history—as a nation—are masculine and strongly dominated by male narratives. There is no space for women to be present in the narratives of the past. As if the history of Indonesia is a history of men, whereas if critical research is done then women such as men have a past narrative that is also important. Women are present and give meaning to the development of the nation’s history. This matter is absent in Indonesian historiography. The strength of gender bias in the historiography of Indonesia can not be separated from the strong patriarchal culture in the life of society. Thus the gender bias ultimately forms a canon, so this is then reproduced from generation to generation. This article argues that critical research by revealing a new fact is a power to change gender bias in Indonesian historiography.

Keywords: gender bias, nationalism awareness, women’s history writing

Tulisan ini mendiskusikan tentang bias gender di dalam tradisi historiografi Indonesia. Berbagai kepastakaan sejarah mencatat bahwa semua peristiwa besar terkait dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa, bersifat maskulin dan sangat didominasi oleh narasi laki-laki.

Tidak ada sedikit pun ruang bagi perempuan untuk hadir di dalamnya. Seakan-akan sejarah Indonesia adalah sejarahnya laki-laki, padahal jika penelitian kritis dilakukan maka perempuan seperti halnya laki-laki mempunyai narasi masa lalu yang tidak kalah penting. Perempuan hadir dan memberi arti bagi perkembangan sejarah bangsa. Hal inilah yang absen dalam historiografi Indonesia. Kuatnya bias gender di dalam historiografi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian bias gender pada akhirnya membentuk sebuah kanon, dan kemudian direproduksi dari generasi ke generasi. Artikel ini berargumen penelitian kritis dengan mengungkapkan fakta baru merupakan kekuatan untuk mengubah bias gender di dalam historiografi Indonesia.

Kata kunci: bias gender, kesadaran kebangsaan, penulisan sejarah perempuan

Lelly Andriasanti (Qureta, Jakarta, Indonesia)

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017

Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 161-171, 2 tabel, 1 gambar, 18 daftar pustaka

The chaotic political issues always accompany the nation of Indonesia until this day. One of them is reflected in political dimension which summarized on the intolerance narrative in the election of Jakarta governor in 2017. Nonetheless, gender and women dimensions seem to shrink from public attention. Within the framework of the state, the important role of women for national life is reduced in the ideology of ibuisms. This ideology actually finds a way in triggering activation of women when adapting to Political Islam. For that reason, research question of this paper is how the ibuisms of political Islam affect the perception and preferences of female voters in the election of Jakarta governor in 2017? In order to answer the question, this paper uses a qualitative methodology with a phenomenological approach. As the final result, this paper conclude that in the framework of ibuisms of political Islam, women played a role as agent which directing women voter perception. It is worked in taklim's mobilization network where women voter are asked vow to vote or do not vote particular candidate in Jakarta governor election in 2017.

Keywords: ibuisms of political Islam, Jakarta governor election, state ibuisms, politization of women's voice

Carut-marut persoalan politik selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satunya tampak pada dimensi politik yang terangkum dalam narasi intoleransi di Pilgub Jakarta 2017. Walakin, dimensi gender dan perempuan seolah-olah menyusut dari perhatian publik. Dalam kerangka negara, peran penting perempuan dalam kehidupan kebangsaan direduksi dalam paham ibuisme. Ideologi ini justru menemukan jalan dalam memicu aktivasi perempuan ketika beradaptasi dengan Islam Politik. Atas dasar itulah, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ibuisme Islam politik memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih perempuan dalam Pilgub Jakarta 2017? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai hasil akhir, tulisan ini menyimpulkan kerangka ideologi ibuisme Islam Politik telah mendorong perempuan untuk memainkan peran sebagai agen yang mengarahkan persepsi pemilih perempuan. Hal ini dilakukan dalam jejaring mobilisasi taklim atau pengajian di mana para pemilih perempuan dimintai sumpah untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu dalam Pilgub Jakarta 2017.

Kata kunci: ibuisme Islam politik, Pilgub Jakarta, ibuisme negara, politisasi suara perempuan.

Fitria Sari (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme

Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 173-182, 6 daftar pustaka

The discussion on terrorism is currently focused on issues concerning law enforcement efforts, cooperation between defense institutions, analysis of legal policies, and definitions of terrorism. Women (especially wives) are excluded from the process of dialogue and response to terrorism. This study emphasizes the experience and voice of the wives of former convicted terrorists. This article explores the process of upheaval and negotiation from the extremist narratives contained in the logic of thinking as a struggle in the context of self-acceptance and autonomy. This study uses a case study approach with a feminist perspective, and in-depth interviews as a method of data collection. The feminist view of Relational Autonomy and the Politics of Piety was chosen as a theoretical framework for analyzing findings. The results of the study indicate that there is an indoctrination from the husband about the teachings of extremism and that the wife experiences a struggle to internalize the teaching. On the other hand, there are also findings that show wives also negotiate with their husbands in carrying out the teachings of extremism. The conclusion of this study shows that the wife's figure experiences the process of constructivism and relational autonomy in the struggle process and its negotiations so far. In addition, the wife can also be seen as an agent to strengthen the spirit of nationalism through the values of tolerance.

Keywords: terrorism, extremism, wife of former convicted terrorist, husband and wife relations, relational autonomy

Diskursus terorisme saat ini masih berfokus pada isu tentang upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijakan hukum, dan definisi tentang terorisme. Perempuan (khususnya istri) menjadi sosok yang tereklusi dalam proses dialog dan respons mengenai terorisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Artikel ini mengupas proses pergolakan dan negosiasi dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berpikir sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pandangan feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalahan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indoktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme dan istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan para istri juga melakukan negosiasi kepada suami dalam menjalankan ajaran ekstremisme. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergolatan dan negosiasinya selama ini. Selain itu, istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui nilai-nilai toleransi.

Kata Kunci: terorisme, ekstremis, istri mantan narapidana terorisme, relasi suami istri, otonomi relasional

Ruth Indah Rahayu¹, Iqraa Runi Aprilia² (¹Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif [Inkrispena], Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan

***Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations
About Women and Nationalism***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 183-192, 16 daftar
pustaka

Contemporary feminists in Indonesia do not yet have questions about nationalism, since the conversation about nationalism has been considered final at the beginning of Indonesian independence. In fact, in terms of contemporary analysis, women have problems with nationalism, when the definition of nationalism is dominated by the study of political science that is male-view biased. By tracing history to contemporary time, the relationship between women and nationalism is dominated by patriarchal interests for the mobilization of power, even if women have an independent political interest. That is why political interests of women are situated marginally in nationalism. But if we use the perspective of the social sciences, as feminist theories, then the notion of nationalism is broader than that of women and the state. We are still less productive in abstracting the relationship between women and citizens in nationalism, while it is a daily practice of women's struggles both personally and organically. Women have proven to be an active agency to become citizens beyond the mobilization of the state. This paper seeks to arouse feminist questions about nationalism, in order to reveal the role of women who are hidden in nationalism.

Keywords: feminist talks, feminist question, women, nationalism, citizenship, marginally situated

Feminis kontemporer di Indonesia belum mempunyai pertanyaan tentang kebangsaan, karena percakapan tentang kebangsaan telah dianggap final pada awal kemerdekaan Indonesia. Faktanya, ditinjau dari kondisi dan waktu kontemporer, perempuan mempunyai problem dengan kebangsaan, ketika definisi kebangsaan didominasi oleh studi ilmu politik yang bias *male-view*. Dengan merunut sejarah hingga waktu kontemporer, relasi antara perempuan dan kebangsaan didominasi oleh kepentingan patriarki untuk mobilisasi kekuasaan, sekalipun perempuan mempunyai kepentingan politik yang independen. Itu sebabnya kepentingan politik perempuan disituasikan marginal dalam kebangsaan. Akan tetapi jika kita menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial, sebagaimana teori-teori feminis, maka pengertian kebangsaan lebih luas dari sekadar relasi perempuan dan negara. Kita masih kurang produktif dalam mengabstraksikan relasi perempuan dan kewargaan di dalam kebangsaan, padahal itulah praktik sehari-hari yang diperjuangkan perempuan secara pribadi maupun terorganisasi. Perempuan telah terbukti menjadi agensi yang aktif untuk menjadi warga dan warga negara melampaui mobilisasi negara. Tulisan ini berusaha untuk membuat pertanyaan feminis tentang kebangsaan, agar dapat mengungkap peranan perempuan yang disituasikan tersembunyi dalam kebangsaan.

Kata kunci: percakapan feminis, pertanyaan feminis, perempuan, kebangsaan, kewargaan, disituasikan marginal

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017¹

Ibuism of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017

Lelly Andriasanti

Qureta

Jl. Utan Kayu No. 68H, Jakarta Timur 13120 Indonesia

lelly15a@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 1 Juli 2018, direvisi 27 Juli 2018, diputuskan diterima 11 Agustus 2018

Abstract

The chaotic political issues always accompany the nation of Indonesia until this day. One of them is reflected in political dimension which summarized on the intolerance narrative in the election of Jakarta governor in 2017. Nonetheless, gender and women dimensions seem to shrink from public attention. Within the framework of the state, the important role of women for national life is reduced in the ideology of ibuism. This ideology actually finds a way in triggering activation of women when adapting to Political Islam. For that reason, research question of this paper is how the ibuism of political Islam affect the perception and preferences of female voters in the election of Jakarta governor in 2017? In order to answer the question, this paper uses a qualitative methodology with a phenomenological approach. As the final result, this paper conclude that in the framework of ibuism of political Islam, women played a role as agent which directing women voter perception. It is worked in taklim's mobilization network where women voter are asked vow to vote or do not vote particular candidate in Jakarta governor election in 2017.

Keywords: ibuism of political Islam, Jakarta governor election, state ibuism, politization of women's voice

Abstrak

Carut-marut persoalan politik selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satunya tampak pada dimensi politik yang terangkum dalam narasi intoleransi di Pilgub Jakarta 2017. Walakin, dimensi gender dan perempuan seolah-olah menyusut dari perhatian publik. Dalam kerangka negara, peran penting perempuan dalam kehidupan kebangsaan direduksi dalam paham ibuisme. Ideologi ini justru menemukan jalan dalam memicu aktivasi perempuan ketika beradaptasi dengan Islam Politik. Atas dasar itulah, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ibuisme Islam politik memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih perempuan dalam Pilgub Jakarta 2017? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai hasil akhir, tulisan ini menyimpulkan kerangka ideologi ibuisme Islam Politik telah mendorong perempuan untuk memainkan peran sebagai agen yang mengarahkan persepsi pemilih perempuan. Hal ini dilakukan dalam jejaring mobilisasi taklim atau pengajian di mana para pemilih perempuan dimintai sumpah untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu dalam Pilgub Jakarta 2017.

Kata kunci: ibuisme Islam politik, Pilgub Jakarta, ibuisme negara, politisasi suara perempuan.

Pendahuluan

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 telah menyita banyak perhatian publik baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, untuk pertama kalinya bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta menghadirkan representasi dari minoritas agama dan ras, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sementara pada tataran internasional, perhatian mereka justru tertuju pada intensitas isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di ibukota Indonesia—negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Bahkan the Economist Intelligent Unit (EIU) menyebut Indonesia sebagai negara yang kurang

demokratis. Dalam indeks demokrasi 2017, posisi Indonesia merosot drastis dari sebelumnya berada pada peringkat 20 menjadi 68 (EIU 2017).

Besarnya isu intoleransi seputar Pilgub DKI Jakarta 2017 hanyalah sekelumit persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini. Namun hal ini tidak diiringi dengan munculnya perhatian publik pada isu gender dan perempuan. Eksistensi perempuan terlanjur dianggap menyatu dalam kerangka negara sehingga tidak perlu ada formula khusus untuk mengatasinya. Padahal, signifikansi posisi perempuan terletak pada peran historisnya yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pendiri

bangsa, Maria Ulfah-Subadio menegaskan, perempuan Indonesia memang telah menjadi satu bagian dari upaya kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1930. Adapun peranan perempuan yang paling menonjol di awal-awal pendirian republik, yaitu masuknya asas persamaan hak antara perempuan dan pria dalam rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang nantinya akan berdiri (Rasid 1982).

Signifikansi posisi perempuan juga tampak dari segi kuantitasnya yang mengambil setengah porsi dari jumlah penduduk negeri ini. Untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 saja, jumlah pemilih perempuan mencapai 3.608.201 suara. Angka ini hanya selisih 1.878 suara dari pemilih laki-laki yang berjumlah 3.610.079 suara (Komisi Pemilihan Umum 2017). Pada konteks itu, suara perempuan jelas diperebutkan. Hal ini karena suara perempuan selalu diasumsikan sebagai *swing voters*. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta sengaja menyediakan sesi khusus dalam debat cagub-cawagub agar para kandidat dapat beradu program terkait pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pemilih perempuan sekaligus menguji rasionalitas mereka dalam menentukan pilihannya.

Akan tetapi, sebagian besar pemilih perempuan di Jakarta sepertinya menyandarkan preferensi mereka secara emosional. Dalam hal ini, Burhanuddin Muhtadi (2017) memaparkan bahwa "kepala" (rasional) dan "hati" (emosional) sebagian warga Jakarta terbelah. Di satu sisi, mereka mengakui kinerja Ahok yang terbilang baik. Di sisi lain, mereka tetap sulit menerima Ahok karena besarnya sentimen isu penodaan agama (Muhtadi 2017). Dari sini dapat ditarik garis besar bahwa agama sebagai landasan emosional turut memengaruhi preferensi politik perempuan.

Hal ini tidak begitu mengejutkan melihat tumbuh suburnya fenomena *reborn as a muslim* atau muslim yang "terlahir kembali" di kalangan perempuan urban (Hakim 2016). Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman mereka yang memperoleh pemahaman dan pemaknaan baru sebagai seorang muslimah ketika bergabung dalam gerakan Islam. Dahaga spiritual membuat mereka memilih pengajian intensif yang menekankan sisi doktrin sekaligus praktis ajaran Islam (Marcoes-Natsir & Octavia 2014).

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia juga memberi perempuan dasar keterikatan. Menurut Julia Suryakusuma, kaum perempuan tidak bisa eksis atas dirinya, ia selalu berhubungan dengan sesuatu

atau seseorang yang lain (Suryakusuma 2011). Sesuatu dalam arti ini dapat merujuk pada keluarga, komunitas, negara, dan juga agama. Sementara seseorang yang dimaksud di sini dapat berupa anak, suami, ayah, ataupun ulama. Konstruksi keperempuanan inilah yang dikenal dengan paham ibuisme. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, negara memegang kuasa dalam menafsirkan ideologi gender untuk kepentingannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk membendung dan memanipulasi kekuatan perempuan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Dari situlah Julia Suryakusuma menyebutnya sebagai ibuisme negara.

Dalam paham ibuisme negara, kaum perempuan harus melayani anak-anak, suami, keluarga, masyarakat, dan negara. Maksudnya, keutamaan diri perempuan terletak pada perannya sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh anak, dan pendukung karier suami. Ia juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan negara, seperti Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka harus bersedia bekerja tanpa bayaran. Meski mereka mendapat bayaran, imbalannya terbilang rendah. Status dan kekuasaan juga bukan milik perempuan karena keduanya adalah hak laki-laki. Kalaupun perempuan kalangan elite terkesan berkuasa atas perempuan kelas bawah, itu hanyalah kekuasaan derivatif dari status dan kekuasaan yang didapatkan sang suami. Kekuasaan itu hanya bisa digunakan untuk menyalurkan kekuasaan negara (sebagai bapak) terhadap rakyatnya (sebagai anak). Gambaran relasi negara sebagai bapak dan rakyat sebagai anak ini terlihat dari cara Orde Baru mendefinisikan dirinya sebagai "keluarga" dan penyebaran paham "asas kekeluargaan". Paham ini digunakan Suharto untuk mengangkat dirinya sebagai "bapak bangsa" yang melindungi seluruh bangsa Indonesia. Ia juga menampilkan dirinya sebagai bapak atau pemimpin keluarga inti di mana semua anggotanya wajib tunduk kepadanya dan kritik atas dirinya dianggap pantang (Nasution 2010).

Ketika reformasi memberikan ruang bagi pergerakan Islam politik, ibuisme lambat laun menyerap doktrin-doktrin Islam. Dalam hal ini, Islam menjadi penanda identitas politik yang tersemat dalam ibuisme yang merupakan ideologi kultural. Oleh karena itu, saya menyebutnya sebagai ibuisme Islam politik. Akulturasi ini merupakan salah satu tujuan dari transformasi sosial yang diharapkan kelompok-kelompok Islam politik. Bagi pergerakan Islam politik, kepentingan Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini tidak terakomodasi di pemerintahan. Setelah menyusup ke tingkat sosial,

aksi mereka terus berlanjut pada tingkat legal formal. Itu hanya bisa ditempuh melalui sarana pemilu. Jika demikian, ibuisme Islam politik dapat diartikan sebagai ideologi yang mendefinisikan perempuan muslim dalam menyuarakan simbol-simbol dan kepentingan Islam politik. Selanjutnya, bagaimana ibuisme Islam politik memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih perempuan dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017?

Metode Penelitian

Fenomena Pilgub DKI Jakarta 2017 memang menarik untuk dikaji. Topik ini tidak lagi menjadi domain studi politik saja. Para akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan pun melakukan sejumlah studi. Salah satunya adalah Christiany Juditha yang berlatar belakang teknologi informasi. Ia mengambil fokus pada fanatisme para pendukung masing-masing Cagub-Cawagub yang justru mendorong aktivitas ujaran kebencian di media online dalam bentuk komentar (Juditha 2017). Ia memaparkan fakta bahwa meski semua pasangan calon (Paslon) mendapatkan komentar dari warganet, tetapi hanya pasangan Ahok-Jarot yang paling banyak menerima ujaran kebencian berunsur SARA.

Sementara itu, akademisi politik Ankush Anjay Wagle melihat kasus tersebut dalam studi perbandingan politik. Ia menemukan fakta bahwa sistem politik baik di Indonesia maupun di India memungkinkan mekanisme yang membiarkan agama sebagai cara-cara elektoral untuk menjatuhkan lawan politik (Wagle 2017). Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan. Dalam kasus India, agama telah dikooptasi secara bertahap melalui kebijakan yang bernuansa mayoritas. Sementara di Indonesia telah mengambil bentuk undang-undang penodaan agama yang dikombinasikan dengan religiositas publik.

Baik Wagle maupun Juditha memang telah menyinggung masalah SARA dalam fenomena Pilgub Jakarta 2017. Namun, dimensi isu perempuan dan gender dalam kasus ini masih terbilang belum banyak tersentuh. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memaparkan keterlibatan perempuan dalam Pilgub Jakarta 2017 melalui pendekatan fenomenologi. Sebagai salah satu jenis metode penelitian kualitatif, fenomenologi merupakan penelitian yang menaruh fokus pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Terkait hal itu, fenomena yang ada dalam tulisan ini bukan hanya seputar Pilgub Jakarta 2017, tapi juga fenomena pergerakan Islam politik yang menghingngapi banyak perempuan sejak reformasi 1998.

Dalam fenomenologi, realitas terpenting adalah bagaimana menangkap makna-makna dari tingkah laku manusia; menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif, dan pemikiran yang ada di balik tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang itu sendiri (Bodgan & Taylor 1993). Untuk itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi partisipan, wawancara, dan studi kepustakaan. Terkait studi dalam tulisan ini, observasi dan wawancara dilakukan di sekitar Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Sementara studi kepustakaan pada studi ini mengambil fokus pada interpretasi sejumlah berita di media cetak dan elektronik. Guna menampilkan diskursus alternatif yang sarat akan nilai-nilai Indonesia, tulisan ini akan menggunakan konsep ibuisme yang lekat dengan budaya Jawa. Konsep ini kemudian disesuaikan dengan konteks Islam Politik yang berkembang pasca Orde Baru. Untuk itu, kedua konsep tersebut akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Ibuisme sebagai Konsep Awal

Orang Indonesia umumnya mengenal istilah ibu. Namun tidak demikian dengan ibuisme, istilah ini masih terbilang awam dan hanya diketahui oleh kalangan feminis dan akademisi yang menaruh fokus pada isu gender dan perempuan di Indonesia. Istilah ibuisme muncul pertama kali dalam tulisan Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis berjudul "Ibuisism and Priyayization: Path to Power?" yang dimuat dalam *Indonesian Women in Focus*. Ia merumuskan ibuisme sebagai ideologi yang mendukung setiap tindakan yang diambil oleh perempuan yang mengurus keluarga, kelompok, kelas, atau negaranya tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1992).

Ibuisme memuat tiga ciri utama, yaitu 1) perempuan harus mendapatkan pendidikan tinggi yang berguna untuk mendukung suami dan perkembangan anak-anak mereka agar hidup sejahtera; 2) perempuan harus mampu memberikan kontribusi bagi kebutuhan finansial keluarga, baik dengan bekerja, berdagang, dan lain sebagainya; 3) perempuan harus dapat menjaga status sosial keluarga mereka. Ketiganya merupakan gabungan nilai-nilai borjuis kecil Belanda dengan nilai-nilai tradisional priayi yang lahir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Djajadiningrat jelas mengaitkan ibuisme dengan proses priyaisasi. Priayi sendiri merupakan konsep yang kental akan nilai dan budaya Jawa. Namun, priayi yang dimaksud di sini adalah

kalangan elite. Dari sini terlihat bahwa Djajadiningrat tidak hanya menjelaskan ibuisme dalam konsep budaya tapi juga status, kelas sosial, dan kekuasaan.

Tidak hanya itu, Djajadiningrat juga menyebut ibuisme sebagai ideologi kultural yang khas Indonesia. Akan tetapi, penekanan ini luput dari penjelasan bagaimana ideologi itu diaplikasikan di masyarakat sehingga mengakar kuat. Pada bagian inilah Julia Suryakusuma menghadirkan ibuisme dalam kerangka negara dengan birokrasi militer menjadi bagian dari priyayi baru. Suryakusuma menyandingkan ibuisme dengan pengiburumahtangaan. Kedua konsep itu merupakan konstruksi keperempuan yang sengaja dibentuk pemerintah Orde Baru. Tujuannya tidak lain untuk mendomestikasi perempuan Indonesia. Menurutnya, domestikasi merupakan bentuk penjinakan, segregasi, dan depolitisasi kaum perempuan (Suryakusuma 2011)

Kaum perempuan dijinakkan dalam proses akumulasi modal. Artinya, perempuan yang bekerja hanya akan menjadi buruh murah. Hal ini ditujukan untuk menarik modal asing. Perempuan disegregasikan baik dalam pembangunan dan kebijakan. Hal ini tercermin dari program-program dan pelembagaan khusus untuk perempuan. Perempuan didepolitisasi. Maksudnya, perempuan dimasukkan dalam konsep massa mengambang demi pembangunan nasional. Dengan kata lain, ibuisme berasal dari kepentingan negara dalam mempertahankan kekuasaan dan kontrolnya atas masyarakat. Hal ini diterapkan melalui berbagai lembaga yang diciptakan negara. Pada tingkat elite terdapat Dharma Wanita, Kowani, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Sementara pada tingkat akar rumput, pemerintahan Orde Baru membentuk PKK. Perempuan yang terlibat dalam pengorganisasian tersebut kebanyakan adalah para perempuan yang sudah menikah, para istri, dan para ibu yang memiliki anak.

Perlu diingat, konsepsi ibu di Indonesia berbeda dengan pemahaman keibuan di Barat yang hanya menekankan pada faktor biologis. Secara harfiah, kata ibu merujuk pada perasaan hormat yang ditujukan pada perempuan. Oleh karena itu, perempuan manapun di Indonesia bisa dipanggil ibu, tidak peduli mereka memiliki anak atau tidak. Sekalipun konsep ibu berasal dari keibuan biologis, tetapi telah mengalami pelebaran cakupan perannya yang menjadi lebih luas (Locher-Scholtern & Niehof 1992). Dalam sejarah pergerakan nasional, peringatan Hari Ibu menandai emansipasi kaum perempuan Indonesia dalam hubungannya dengan persatuan nasional dan nasionalisme (Suryakusuma

2011). Dengan kata lain, Hari Ibu di Indonesia memiliki makna yang berbeda dengan *Mother's Day* di Barat.

Dengan demikian, ibuisme tentu mencakup konstruksi keperempuan yang tidak memandang batas usia. Djajadiningrat menyinggung ini dalam peran dan posisi nyata yang harus ditanggung perempuan baik ketika dia menjadi anak, istri, dan ibu. Meski begitu, studi-studi sebelumnya belum menyentuh aspek anak perempuan dan remaja putri. Aspek lain yang belum dikaji terkait ibuisme adalah eksistensinya pascareformasi. Pasalnya, ibuisme tidak serta-merta menghilang ketika Suharto turun dari jabatannya sebagai presiden pada 1998 setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak. Reformasi dan demokratisasi justru memberikan angin segar bagi pergerakan Islam politik yang tentunya berimbas pada konstruksi keperempuan di Indonesia.

Terlepas dari itu, apresiasi patut diberikan kepada Djajadiningrat atas sumbangan utamanya dalam meletakkan landasan bagi pengembangan konstruksi keperempuan Indonesia. Ia melahirkan konsep terkait sistem patriarki yang khas Indonesia. Tidak kalah dengan Djajadiningrat, Suryakusuma telah membangun pemetaan tentang implikasi dan aplikasi ibuisme pada tataran perempuan elite dan perempuan di tingkat akar rumput, khususnya desa.

Mendefinisikan Ibuisme Islam Politik

Orang awam kerap mengartikan politik Islam (*Islamic politic*) dan Islam politik (*political Islam*) secara tumpang tindih. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Sistem politik Islam adalah sistem yang mencakup segala aspek kehidupan. Penganutnya menganggap Islam sebagai ajaran komprehensif, serba inklusif dan cocok untuk segala zaman dan tempat (Assyaukanie 2011). Lebih lanjut, politik Islam menaruh tendensi pada bagaimana nilai-nilai moral Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan seperti keadilan, kesetaraan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menegaskan penegakan politik Islam tidak selalu berbentuk partai politik. Secara sederhana, pemahaman mengenai politik Islam ini dapat kita temukan dalam ungkapan Mohammad Abduh tokoh pembaru muslim asal Mesir, "Saya melihat Islam di Barat, tapi saya tidak temukan kaum muslim di sana."

Sementara Islam politik ditafsirkan sebagai upaya sekelompok orang yang berkepentingan meraih kekuasaan dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Untuk meraih kekuasaan tersebut, Islam politik umumnya membutuhkan organisasi terstruktur sebagai

kendaraan utamanya. Hal ini bisa berupa partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ataupun organisasi masyarakat seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Setidaknya ada empat motif utama perempuan menjadi sasaran pertama dari arus besar Islam politik. Pertama, Islam politik menjadikan perempuan sebagai simbol kemurnian agama sehingga pandangan, sikap, dan tubuhnya perlu diatur. Kedua, perempuan merupakan agen yang paling mudah dikontrol karena minim resistensi. Sejak dari pikiran, mereka telah ditundukkan oleh sistem patriarki. Ketiga, mereka juga menjadi agen yang murah karena dapat menyebarkan kepentingan-kepentingan Islam politik. Dengan kata lain, mereka tidak menuntut bayaran dan cukup senang dengan imbalan pahala yang menjanjikan surga. Keempat, mereka menjadi tolak ukur keberhasilan dari Islam politik. Dapat dikatakan Islam politik sarat akan pandangan patriarki. Terkait hal ini, Syafiq Hasyim mendefinisikan patriarkisme Islam sebagai cara pemaknaan atau bentuk penafsiran atas Islam yang dihasilkan dari penggabungan cara baca harfiah dan asumsi sosial kultural tentang nilai-nilai pengutamaan laki-laki atas perempuan (Hasyim 2010). Hal itu tentunya didasarkan pada jenis kelamin biologis dan bukan didasarkan pada kapasitas non fisik yang dimiliki seseorang.

Pada tahapan itu, ibuisme dan Islam politik memiliki beberapa persamaan pandangan, khususnya mengenai bagaimana posisi perempuan ditempatkan dalam rumah tangga. Dalam ibuisme, peran dan posisi nyata bagi perempuan disembunyikan dalam sosok ibu yang menjaga kesejahteraan keluarga; kemudian sosok istri dan anak perempuan yang berusaha melakukan hal terbaik dalam situasi tersulit. Ketiganya bukanlah sosok yang mengancam ataupun melanggar otoritas laki-laki. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Islam politik yang membangun konseptualisasi bersifat ketidaksetaraan dengan mengutamakan posisi laki-laki. Konseptualisasi ini biasanya menyinggung ayat-ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hal-hal khusus seperti kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Dalam hal ini, perempuan mendapat kewajiban yang harus dipenuhi pada tiap fase kehidupannya baik sebagai anak, istri, dan ibu. Sebagai anak, ia wajib patuh kepada orang tua. Sebagai istri, ia harus setia, patuh, dan memuaskan hasrat seksual suami. Ia pun harus meminta izin suaminya untuk berbagai hal yang menyangkut dirinya. Sebagai ibu, ia harus mengasuh dan menyayangi anak-anaknya meski harus bertindak diskriminatif terhadap anak perempuannya. Hal ini berkaitan dengan perbedaan hak

antara anak perempuan dan laki-laki yang harus dipenuhi orang tua, seperti masalah akikah dan waris.

Berbicara mengenai hak perempuan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok di antara ibuisme dan Islam. Salah satu dan paling utama adalah hak mengeluarkan pendapat atau hak politik. Ibuisme sebagai turunan dari nilai-nilai priayi Jawa tidak mengizinkan perempuan untuk berpendapat. Sementara Islam justru memberikan hak politik perempuan seperti menyampaikan pendapat, baiat, berjihad, dan memberikan perlindungan (Nasif 1999). Dalam Islam, posisi penting yang diduduki kaum perempuan terwujud dalam baiat dan penegasan atas kelayakannya (Nasif 1999). Secara historis, baiat tersebut menyangkut ketaatan perempuan sebagai muslim kepada nabinya, sekaligus ketaatan sebagai istri kepada suaminya. Sementara yang dimaksud penegasan atas kelayakan diri di sini adalah kelayakan diri sebagai pengikut dan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Pada ranah perkawinan, hal ini menyangkut kehormatan diri perempuan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya (Nasif 1999).

Persamaan dan perbedaan antara Islam politik dan ibuisme saling beradaptasi sehingga menciptakan varian ibuisme Islam politik. Tendensi Islam politik di sini bukan sekadar bentuk politik identitas tetapi juga arah keberpihakan pada kelompok agama mayoritas di negeri ini. Baiat khususnya, merupakan bentuk persetujuan yang bersifat politis. Oleh karena itulah unsur ini memungkinkan Islam politik untuk melakukan politisasi suara perempuan. Adapun priayi yang dimaksud dalam konteks ini adalah golongan intelektual Islam politik, baik tradisional maupun reformis. Golongan Islam tradisional terdiri dari guru (ustaz) pesantren tradisional yang mendapat julukan kiai atau ulama. Kelompok ini hidup berdampingan dengan pengikutnya yang berpendidikan modern. Kebanyakan dari mereka cenderung moderat. Di sisi lain golongan intelektual Islam reformis muncul sejalan dengan meningkatnya sistem dan perasaan nasionalisme melalui perkembangan sekolah agama modern. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya kebangkitan kelompok-kelompok pembaruan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik meski cenderung puritan. Selanjutnya bagaimana proses priayisasi terjadi?

Pada dasarnya, proses priayisasi sangat mengandalkan edukasi. Melalui edukasi, seseorang mengetahui dan mempelajari aturan bertingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma tertentu agar seseorang

menjadi teladan bagi yang lainnya (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1992). Pada golongan Islam tradisional, edukasi jelas didapatkan melalui pesantren. Sementara pada golongan Islam reformis, edukasi diperoleh melalui proses *tarbiyah Islamiyyah* (pembinaan dan pendidikan Islam) yang dikelola oleh unit kerohanian Islam yang ada di lingkungan sekolah, kampus, dan kantor. Proses tarbiah merupakan inti dalam pembentukan habitus dakwah bagi golongan Islam reformis (Munandar 2011). Proses tarbiah diawali dengan pertemuan-pertemuan kecil yang biasa disebut dengan *liqa* atau pertemuan dengan lebih banyak orang yang disebut majelis taklim. Untuk *liqa*, biasanya dilakukan seminggu sekali. Hal ini berguna untuk menjaga soliditas jemaah. *Liqa* juga berperan memastikan para jemaah untuk berkiprah di ranah publik. Adapun pemimpin *liqa* dipanggil dengan *murabbi*. Mereka yang menjadi *murabbi* umumnya memiliki ilmu agama yang lebih dari jemaahnya. Secara garis besar perbedaan antara ibuisme negara dan ibuisme Islam politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbedaan antara Ibuisme negara dan Ibuisme Islam politik

Keterangan	Ibuisme negara (Julia Suryakusuma)	Ibuisme Islam politik
Ideologi	Pancasila	(Patriarkisme) Islam politik
Kalangan elite (aktor)	Birokrasi dan militer	Kelompok agama
Kerangka kerja	Lembaga yang dibentuk negara seperti Dharma Wanita dan PKK	Tarbiah melalui <i>liqa</i> dan majelis taklim
Politik	Depolitisasi	Politisasi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bagaimana perbedaan antara ibuisme negara dengan ibuisme Islam politik. Ibuisme negara mengandalkan lembaga-lembaga pemerintahan, seperti PKK dan Dharma Wanita sebagai alat kontrol. Ibuisme Islam politik menjadikan pengajian-pengajian kelompok kecil (*liqa*) ataupun majelis taklim sebagai wahana menanamkan nilai-nilai dan sikap yang menunjang kepentingan-kepentingan Islam politik di kalangan perempuan Muslim. Jika ibuisme negara cenderung melakukan depolitisasi, ibuisme Islam politik membuka ruang luas bagi politisasi suara perempuan muslim.

Dari uraian tersebut, ibuisme Islam politik mengisyaratkan ketimpangan relasi kuasa yang berlapis-lapis. Perempuan ditempatkan pada posisi subordinat, ia dipaksa untuk patuh pada laki-laki, baik saudara laki-lakinya, ayahnya, suaminya, maupun ulamanya. Semua kepatuhan yang mengatasnamakan agama itu diperkenalkan dan ditanamkan pada perempuan sejak dini. Atas dasar itulah tulisan ini bukan hanya memaparkan penerapan ibuisme pascareformasi. Tulisan ini juga mencoba menyinggung aspek anak perempuan dan pemuda yang belum sempat disinggung Suryakusuma.

Militansi Ibuisme Islam Politik dalam Pilgub Jakarta 2017

Sejak Pilgub Jakarta 2012, kemunculan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memang telah mendorong kekhawatiran kelompok-kelompok Islam politik akan adanya pemimpin kafir. Mereka jelas mengharamkan pemimpin kafir karena dianggap akan memengaruhi kaum mukmin. Pengaruh yang dimaksud adalah adanya upaya kristenisasi di Jakarta. Namun demikian, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai cawagub berhasil memenangkan Pilgub ini dengan total 53,82 persen suara.

Kekhawatiran kelompok-kelompok Islam politik menguat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Pada September 2016, sejumlah ulama dan tokoh politik seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan Rizieq Shihab menyelenggarakan deklarasi politik yang disebut Risalah Istiqlal. Adapun sembilan rumusan Risalah Istiqlal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik;
2. Diserukan kepada partai pro rakyat agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan, calon gubernur muslim;
3. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017;
4. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim, dan haram memilih non muslim dan haram pula golput;
5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk *money politic* maupun serangan fajar;
6. Pentingnya partai politik pro rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub cawagub yang disepakati umat;
7. Mengokohkan *ukhuwah* dan mewaspadaai segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh umat;
8. Mengingatkan seluruh pengurus KPU DKI, RT/RW yang ditugasi sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pilgub, agar

terwujud Pilgub DKI yang jujur dan adil; 9) Mengimbau kepada partai yang mendukung calon non muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut. (Sari 2016)

Makna yang tersirat dalam rumusan tersebut cukup jelas, yaitu melarang setiap orang yang beragama Islam untuk memilih Ahok. Meski demikian, risalah yang dideklarasikan di Masjid Istiqlal itu belum mampu memobilisasi massa. Penolakan terhadap Ahok baru mendapatkan resonansi ketika seorang warganet bernama Buni Yani mengunggah video editan pada laman

facebook-nya dengan judul “Penistaan Terhadap Agama”. Video yang merupakan hasil editan dari video kunjungan kerja Ahok ke Pulau Pramuka pada September 2016 itu segera menyulut emosi umat Islam. Banyak dari Ormas Islam di Indonesia mengirimkan pengaduan kepada kepolisian agar segera menindaklanjuti pernyataan Ahok tersebut.

Politisasi dan mobilisasi massa mulai terjadi satu demi satu dengan mengatasnamakan “Aksi Bela Islam”. Aksi berjilid ini biasanya dilaksanakan setiap Jumat dan diikuti para peserta yang mengenakan pakaian serba putih. Kronologi aksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2
Kronologi “Aksi Bela Islam”

Urutan	Keterangan
Aksi Bela Islam I 14 Oktober 2016	Aksi pertama mengambil tempat di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Oktober 2016. Dalam aksi ini, ribuan ormas yang dipimpin FPI menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan. Bahkan Ketua FPI Habib Rizieq Shihab mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tidak kunjung ada respons atas tuntutan tersebut dalam waktu 3 minggu berikutnya.
Aksi Bela Islam II 4 November 2016	Aksi ini mengambil tempat di depan Istana Negara. Pengunjuk rasa mendapat kesempatan bertemu dengan Menkopolhukam, Wiranto dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk mendiskusikan jalan keluar terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi penyelidikan kasus ini. Meski aksi ini dikenal dengan “Aksi Damai 411”, aksi ini berakhir dengan keributan.
Aksi Bela Islam III 2 Desember 2016	Aksi ini berupa ibadah bersama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengancam tidak akan mengeluarkan izin untuk aksi tersebut karena khawatir akan ditunggangi pihak-pihak yang hendak melakukan kerusuhan seperti pada aksi sebelumnya. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak penyelenggara dan kepolisian, maka aksi ini dapat berlangsung dengan kegiatan yang berupa berdoa dan melakukan salat Jumat bersama. Bahkan Presiden Joko Widodo hadir dalam acara ini.
Aksi Bela Islam IV 11 Februari 2017	Aksi ini bertema “Dzikir dan Tausiyah Nasional untuk Penerapan Surat Al-Maidah 51: Wajib Pilih Pemimpin Muslim dan Haram Pilih Pemimpin Kafir”. Setidaknya ada empat pesan yang disuarakan dalam aksi ini yaitu memastikan dukungan penduduk Jakarta untuk menolak penodaan Alquran; menolak kriminalisasi dan penghinaan terhadap ulama; menjaga Pilgub Jakarta yang jujur dan adil; dan mewajibkan memilih kepala daerah yang muslim.
Aksi Bela Islam V 21 Februari 2017	Aksi ini berlangsung di kawasan Gedung DPR, Senayan. Aksi ini memuat tuntutan sebagai berikut: 1) Meminta DPR/MPR melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta; 2) Seseorang dengan status terdakwa kasus dugaan penodaan agama seperti Ahok tidak layak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta; 3) Meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, serta minta aparat penegak hukum menangkap Ahok.
Aksi Bela Islam VI 31 Maret 2017	Aksi ini memuat tiga tuntutan, yaitu: 1) meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama; 2) meminta Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan massa aksi; 3) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
Aksi Bela Islam VII 5 Mei 2017	Aksi ini dihadiri oleh Abdullah Gymnastiar dan Arifin Ilham. Tuntutan aksi kali ini adalah meminta agar hakim sidang dalam kasus penodaan agama tidak diintervensi dan meminta Ketua Mahkamah Agung mengawal proses sidang terhadap Ahok yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Secara keseluruhan, "Aksi Bela Islam" tidak merepresentasikan suara perempuan muslim. Jikapun ada perempuan yang ikut dalam aksi tersebut, kehadiran mereka hanya mengafirmasi suara laki-laki, suami, dan ustaz. Kecenderungan yang muncul dalam aksi ini justru meniadakan perempuan sebagai bagian dari umat. Menurut Lailatul Fitriyah, narasi dari aksi berjilid itu jelas-jelas menolak kehadiran perempuan, baik secara struktural maupun sistematis (Fitriyah 2016). Secara struktural, aksi-aksi tersebut mengambil waktu pada ibadah salat Jumat. Ibadah yang dikhususkan untuk laki-laki. Pada ibadah ini perempuan muslim di seluruh dunia Islam memang tidak dianjurkan untuk menghadiri salat Jumat. Ketika ibadah salat Jumat akan mulai, para perempuan akan diminta menyingkir dan memberikan tempat bagi para laki-laki yang hendak beribadah. Hal ini mengesankan, salat Jumat memang seharusnya hanya tentang laki-laki dan maskulinitas mereka (Fitriyah 2016). Secara sistematis, aksi berjilid itu didominasi oleh kelompok-kelompok Islam radikal, seperti GNPf MUI, FPI, dan FUI. Mereka menguatkan kesan jihad dalam aksi-aksi tersebut sehingga unsur kekerasan dianggap sebagai kewajiban (Fitriyah 2016). Hal ini tentu kontradiktif dengan label damai yang sempat mereka pakai. Pada akhirnya, perusakan dan kericuhan menjadi bagian dari aksi jihad mereka.

Bagi perempuan muslim yang terpapar fenomena *reborn as a muslim*, *liqa* dan majelis taklim adalah tempat pelarian bagi rasa alienasi di ruang domestik ataupun frustrasi atas diskriminasi di ruang publik. Bagi mereka, majelis taklim merupakan pilihan termudah untuk mendapatkan dukungan sosial. Mereka mendapatkan sambutan hangat dan menemukan ikatan kekeluargaan di dalamnya (Andriasanti 2017). Dalam wacana di ruang majelis taklim di Jakarta, suara perempuan muslim umumnya mengekor pada ustaz atau ustazah yang menjadi patron mereka. Entah berpendidikan tinggi atau rendah, bekerja ataupun ibu rumah tangga, mereka mendukung arus utama Islam politik yang tidak menginginkan pemimpin di luar kalangan muslim. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut penghakiman terhadap orang yang dianggap menghina agama mereka. Para perempuan muslim ini pun menjadi cenderung anti kritik dan melakukan pengkafiran kepada mereka yang berseberangan. Pergerakan mereka dapat dikatakan sporadis dan militan. Mereka tidak hanya terdapat di Jakarta tapi juga daerah pinggiran Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Mereka tidak hanya menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Ada juga dari mereka yang kemudian berkumpul dan membentuk gerakan Barisan Emak-Emak Militan Indonesia (BEMI).

Militansi para ibu ini bukanlah hal yang mengejutkan. Pada dasarnya, mereka merupakan hasil dari proses tarbiah yang marak pada dua dekade terakhir. Secara khusus, tarbiah menciptakan perempuan partisan yang terlibat dalam politik praktis sebagai bagian kalangan elite perempuan muslim. Umumnya mereka aktif di PKS yang dikenal juga dengan sebutan partai tarbiah. Sementara secara umum, tarbiah memproduksi simpatisan perempuan muslim. Tidak jarang pula, kalangan simpatisan yang lahir dari tarbiah bisa menjadi bagian elite tersebut. Syaratnya cukup dengan memiliki pengetahuan agama yang cukup sehingga ia dapat menjadi *murabbi* atau ustazah bagi komunitasnya. Meski nyatanya lebih banyak simpatisan yang hanya menjadi akar rumput.

Namun, keutamaan tarbiah ini bukan pada keterlibatan seseorang dalam politik praktis, tetapi lebih pada keterlibatan mereka dalam dakwah. Pada tataran ini, dakwah Islam dimaknai sebagai aktivitas terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi itu menuntut tiap pribadi untuk memperkaya kualitas dirinya sehingga dapat mengemban amanah dakwah dan berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial. Dalam budaya jemaah tarbiah, *murabbi* atau ustaz mendapat penghormatan yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan peran *murabbi* yang dianggap sebagai orang tua, sekaligus guru spiritual (*mursyid*), pimpinan atau komando (*qa'id*), dan sahabat. Pada titik inilah *murabbi* menjadi penguasa yang tak bisa dibantah (Munandar 2011). Kepatuhan pada *murabbi* berkaitan dengan budaya tarbiah yang menghargai sikap taat, rendah hati, menahan diri, mudah menerima, dan mengutamakan kesesuaian dan kebersamaan dengan orang banyak.

Sebaliknya, sikap kritis, terbuka, mengemukakan pandangan yang berbeda, dan banyak berargumen bukanlah hal-hal yang menjadi budaya jemaah tarbiah (Munandar 2011). Hal ini sejalan dengan ciri tarbiah yang mengandalkan kombinasi antara kekuatan doktrin, pemahaman, dan perjuangan dakwah. Dari sini terlihat bahwa budaya tarbiah inheren dengan ideologi ibuisme yang mengondisikan perempuan dalam posisi subordinat. Lantas, mengapa proses tarbiah cukup efektif menanamkan ibuisme Islam politik sekaligus berhasil menarik kelompok terdidik, khususnya perempuan untuk bergabung? Hal ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba.

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ibuisme Islam politik menyebar secara efektif di kalangan perempuan. Pertama, proses tarbiah telah terjadi sejak

perempuan duduk di bangku sekolah menengah. Pada tahap ini perempuan masih berusia anak dan cenderung reseptif pada nilai-nilai yang diberikan. Kedua, anak perempuan mendapatkan doktrin ibuisme Islam politik melalui *liqa* pekanan di sekolah. Artinya ada penanaman nilai yang berkesinambungan. Ketiga, tarbiah secara khusus menyasar sekolah-sekolah negeri bergengsi. Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok Islam politik melakukan rekrutmen. Untuk menyebarkan ide-ide keislaman, mereka tentu membutuhkan bibit-bibit unggul. Mereka mempersiapkan anak perempuan untuk menjadi ibu biologis sekaligus ideologis yang kelak dapat mendukung kepentingan Islam politik.

Dari uraian tersebut kita dapat melihat bagaimana pola indoktrinasi terjadi di kalangan perempuan muslim. Mereka yang berusia 20 sampai 35 tahun atau sekarang yang menjadi ibu-ibu muda telah melalui tarbiah ketika mereka masih usia remaja. Sementara mereka yang berusia 35 tahun ke atas melewati proses tarbiah dari *liqa* dan pengajian yang diadakan di lingkungan kantor dan masjid sekitar tempat tinggal. Jika dilihat lebih lanjut, militansi yang terjadi di kalangan perempuan muslim lebih banyak terdapat di kalangan simpatisan. Posisi perempuan dalam hal ini adalah sebagai mesin kampanye gratis sekaligus alat kontrol atas perempuan muslim lainnya. Dengan kata lain, mereka adalah objek politisasi.

Dalam konteks Pilgub Jakarta 2017, politisasi yang terjadi dalam kerangka kerja ibuisme Islam politik dapat berupa aktivitas pemilihan (*electoral activity*) dan aktivitas organisasi (*organizational activity*). Pada aktivitas pemilu, perempuan dapat menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye dan mengajak untuk memilih ataupun tidak memilih kandidat tertentu. Hal ini mewujud dalam perbincangan sehari-hari dan media sosial. Sebagai contoh status *facebook* salah satu pendengung (*buzzer*) berinisial NS yang berisi pernyataan yang ditujukan untuk membungkam suara kritik dari sesama perempuan muslim. Hal ini tampak pada gambar berikut.



Gambar 1. Status Buzzer Seputar Pilgub Jakarta 2017
Sumber: Facebook.

Sementara pada aktivitas organisasi lebih menyangkut keterlibatan perempuan dalam suatu organisasi ataupun komunitas yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan seperti praktik baiat dalam banyak majelis taklim di Jakarta. Telah dijelaskan sebelumnya, baiat berkaitan dengan kepatuhan perempuan muslim kepada agama dan ustaz. Sementara penegasan atas kelayakan diri yang termuat dalam baiat lebih bermuatan identitas politik untuk membedakan antara yang muslim dan yang kafir. Salah satu praktik baiat yang saya dapati terjadi dalam taklim yang berlokasi di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam taklim yang diadakan rutin setiap Kamis pagi, para ibu yang mengikuti taklim tersebut dipaksa berbaiat untuk tidak memilih calon tertentu. Mereka yang tidak bersedia mengikuti baiat akan dianggap kafir. Berdasarkan korespondensi saya dengan beberapa ibu di sana, para ibu yang menjadi panitia taklim sengaja melakukan dokumentasi saat permintaan baiat dilakukan. Bahkan baiat dilakukan satu per satu untuk memastikan siapa saja yang tidak hadir ketika acara berlangsung. Mereka yang tidak hadir dalam acara tersebut umumnya memberikan alasan kesehatan. Mereka mengaku takut dan sengaja membuat alasan itu untuk menghindari tekanan dan intimidasi dari kelompok anti Ahok.

Desakan anti Ahok pun semakin intensif pasca putaran pertama Pilgub Jakarta yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Namun, intimidasi terhadap pemilih perempuan justru mengarah pada misogini. Salah satunya adalah seruan warganet berinisial DA untuk memerkosa perempuan pendukung Ahok. Hal ini diungkapkan dalam status akun *facebook*-nya. Intimidasi lainnya tampak dari tersebarnya sejumlah spanduk yang berisi penolakan untuk menyalatkan jenazah pendukung Ahok di sejumlah lokasi. Di Jakarta Selatan, spanduk tersebut terpajang di daerah Warung Jati, Kalibata, Pondok Pinang, dan masjid Al Jihad Setiabudi. Spanduk yang berbunyi pernyataan serupa juga terpasang di Masjid Jami' At-Tawwab, Cakung Barat, Jakarta Timur.

Penutup

Secara garis besar, ibuisme Islam politik telah melekat pada konstruksi keperempuanan Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Pasca lengsernya Suharto, para perempuan muslim mendapatkan pemaknaan dan pemahaman baru untuk menjalankan doktrin Islam secara menyeluruh (*kaffah*) melalui proses tarbiah. Hal ini kemudian melahirkan fenomena muslim yang "terlahir kembali" di perkotaan. Pada perempuan muslim, proses tarbiah telah berlangsung sejak mereka masih remaja

dan duduk di sekolah menengah. Proses tarbiah yang diperoleh perempuan muslim juga terjadi di lingkungan kantor ataupun masjid-masjid di sekitar tempat tinggal dalam bentuk pengajian-pengajian intensif. Dengan melihat kontinuitas dan sebaran proses tarbiah di daerah urban, perempuan muslim hampir tidak mungkin terhindar dari ajaran doktrin Islam politik. Dari sinilah ibuisme berangsur-angsur beradaptasi dengan Islam politik.

Pada fenomena Pilgub Jakarta 2017, ibuisme Islam politik berkontribusi besar dalam mengarahkan preferensi politik perempuan muslim untuk menjatuhkan kandidat non muslim ataupun memenangkan kandidat yang didukung gerakan Islam politik. Ruang-ruang kerja mereka berada pada jejaring mobilisasi yang tersebar dalam lingkup *liqa* dan taklim. Dalam lingkup ini mereka tidak hanya mendapatkan doktrin tentang keutamaan memilih pemimpin muslim. Mereka juga dimintai sumpah atau baiat dan kesediaannya untuk mengawasi preferensi perempuan lainnya. Oleh karena posisi Jakarta sebagai ibu kota negara, jejaring mobilisasi ibuisme Islam politik tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Dari situ terlihat penggunaan ibuisme Islam politik sepertinya akan menjadi tren politisasi pada penyelenggaraan pesta demokrasi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki konstituen muslim mayoritas. Dalam Pilkada serentak 2018, politisasi suara perempuan dalam kerangka ibuisme Islam politik dapat dilihat dari faktor karakteristik keislaman, budaya dan sejarah lokal. Faktor-faktor tersebut dipakai untuk membaca kesadaran identitas keagamaan dan kedaerahan yang dirasakan kaum perempuan di tingkat lokal. Secara historis, pandangan Islam politik biasanya berasal dari daerah yang memiliki sejarah pergerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), salah satunya adalah wilayah Jawa Barat. Berdasarkan rekam jejak Pilgub Jakarta 2017, wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan tempat yang efektif bagi ibuisme Islam politik dalam memobilisasi perempuan untuk menjadi juru kampanye.

Hal yang harus diperhatikan di sini adalah penekanan politik identitas dalam ibuisme Islam politik sangat berbahaya bagi persatuan bangsa, terlebih jika hal ini kembali dimanfaatkan pada pemilihan presiden 2019. Pasalnya, ia tidak hanya berpotensi mencederai kerukunan umat beragama, namun juga menyuburkan radikalisme dan menumbuhkan terorisme pada diri perempuan. Sayangnya, satu-satunya formula yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan

kebangsaan adalah menggalakkan kembali ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun sengaja didirikan untuk merumuskan kembali falsafah hidup bangsa kita. Jika demikian, paham ibuisme dapat berbalik kembali dalam tafsir negara seperti yang dipaparkan Suryakusuma. Terkecuali jika pemerintah menginsafi sedari awal akan pentingnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kesenjangan sosial yang dihadapi banyak perempuan di Indonesia mungkin dapat dihapuskan.

Daftar Pustaka

- Andriasanti, L 2018, "The Power of Emak-emak dalam Narasi Radikalisme", *www.qureta.com*, 20 Februari 2018, dilihat 30 Maret 2018, <https://www.qureta.com/post/the-power-of-emak-emak-dalam-narasi-radikalisme>
- Assyaukanie, L 2011, *Ideologi Islam dan Utopia*, Freedom Institute, Jakarta.
- Bodgan, R & Steven, TJ 1993, *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*, terj. AK Afandi, Usaha Nasional, Surabaya.
- Fitriyah, L 2016, "Where were the women in 212 protest?", *Jakarta Post*, 15 Desember 2016, dilihat 12 September 2017, <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/15/where-were-the-women-in-212-protest.html>
- Hakim, A 2016, "Islamisme", disampaikan dalam Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa pada 18 Agustus 2015, Megawati Institute, Jakarta.
- Hasyim, S 2010, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Katakita, Depok.
- Juditha, C 2017, "Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, vol. 21, no. 2, hh. 137-151, dilihat 20 Juni 2018, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1134>
- Komisi Pemilihan Umum 2017, *Data Pemilih Tetap Putaran 2 Pilkada Serentak Tahun 2017*, dilihat 13 Oktober 2017, <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/2/nasional>
- Locher-Scholten, E & Niehof, A (ed.) 1992, *Indonesia Women in Focus: Past and Present Notions*, KITLV Press, Leiden.
- Marcoes-Natsir, L & Octavia, L (eds.) 2014, *Kesaksian Para Pengabdian*, Rumah KitaB, Jakarta.
- Muhtadi, B 2017, "Rasionalitas Pemilih Jakarta", *Kompas.com*, 21 Februari 2017, dilihat 29 Juli 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/22505781/rasionalitas.pemilih.jakarta>
- Munandar, A 2011, Antara jemaah dan partai politik: dinamika habitus kader partai keadilan sejahtera (PKS) dalam arena politik Indonesia pasca pemilu 2004, disertasi Program Pasca Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Nasif, FU 1999, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, terj. B Wirasubrata & KD Nuryakien, CV. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.

Nasution, AB 2010, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Rasid, G 1982, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*, Bulan-Bintang, Jakarta.

Sari, N 2016, "Ini 9 Poin 'Risalah Istiqlal' dari Sejumlah Ormas Islam", *Kompas.com*, 18 September 2016, dilihat 12 September 2017, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/18/18165831/ini.9.poin.risalah.istiqlal.dari.sejumlah.ormas.islam>

Suryakusuma, J 2011, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, Komunitas Bambu, Depok.

Wagle, AA 2017, "Religion as an Electoral Tool: a Comparative Analysis of India and Indonesia", *ISAS Insights*, no. 439, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, Singapura.

Catatan Akhir

- 1 Artikel ini merupakan pengembangan dari makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Pengetahuan dari Perempuan (PDP), 24-26 Oktober 2017, Depok, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Program Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
3. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Soe Tjen Marching, Ph.D. (SOAS University of London)
6. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

